



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENILAI PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab III Bagian B angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan pelaksanaan sub kegiatan tentang penerapan pengukuran kinerja individu dilakukan sesuai dengan indikator keberhasilan kinerja organisasi dan dijadikan dasar pengembangan karir individu pegawai/pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman/sanksi (*reward and punishment*);
- b. bahwa sesuai dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Jembrana dan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi atas kinerja Reformasi Birokrasi, perlu menerapkan pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan capaian kinerja organisasi yang telah dicapai berupa pemberian penghargaan (*reward*) dan penjatuhan hukuman (*punishment*;

- c. bahwa untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melakukan penilaian pada pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan penjatuhan hukuman (*punishment*) secara efektif, profesional, adil, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan tim pelaksana yang mampu mendukung dan memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas penerapan kebijakan, kepatuhan prosedur, evaluasi kinerja, dan perbaikan capaian kinerja organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Tim Pengelola dan Penilai Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Hukuman/Sanksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi jdih.kpu.go.id/bali/jembrana

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENILAI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Penilai Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Hukuman/Sanksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim Pengelola dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Ketua Tim mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, penilaian, serta penetapan penghargaan (*reward*) dan hukuman/sanksi (*punishment*) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana;
 - b. menyusun mekanisme, metode, dan kriteria penilaian kinerja pegawai sesuai dengan kebijakan

dan/atau petunjuk teknis dari Sekretaris Jenderal KPU RI selaku PPK dan Sekretaris KPU Provinsi Bali;

- c. memimpin rapat koordinasi/kerja tim untuk membahas hasil evaluasi kinerja dan usulan pemberian penghargaan serta kepatuhan atas penjatuhan hukuman/sanksi;
- d. menandatangani berita acara hasil penilaian dan menyampaikan rekomendasi dan laporan resmi kepada pimpinan.

2. Sekretaris Tim mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi dan seluruh dokumen pendukung (tata tertib, instrumen penilaian, format usulan, dan arsip data kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana);
- b. mengumpulkan, menyusun rekapitulasi, dan mengolah data absensi, capaian kinerja (SKP/e-Kinerja), serta catatan pelanggaran disiplin pegawai dari seluruh unit kerja atau Subbagian);
- c. menyelenggarakan notulensi dan menyiapkan undangan, daftar hadir, serta materi rapat tim;
- d. mendokumentasikan seluruh keputusan dan mengelola arsip laporan pemberian *reward* dan *punishment* secara berkala (bulanan, triwulanan, atau tahunan);
- e. menandatangani berita acara hasil penilaian dan menyampaikan rekomendasi atas pemberian penghargaan (*reward*) dan kronologi penjatuhan hukum/sanksi (*punishment*).

3. Anggota Tim mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap data usulan penghargaan (*reward*) maupun laporan pelanggaran disiplin/kinerja dari masing-masing unit kerja atau Subbagian;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi secara objektif terhadap perilaku, kedisiplinan, inovasi, kompetensi, dan pencapaian target kerja pegawai;

- c. melakukan klarifikasi atau peninjauan lapangan (apabila diperlukan) terhadap prestasi luar biasa atau dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai;
- d. memberikan pertimbangan dan masukan dalam rapat tim mengenai jenis penghargaan (piagam, prioritas pengembangan diri, dan lainnya) atau tingkat dan jenis hukuman/sanksi (teguran lisan, tertulis, hingga usulan pemeriksaan disiplin) yang proporsional, transparan, dan akuntabel;
- e. menandatangani berita acara hasil penilaian dan menyampaikan rekomendasi atas pemberian penghargaan (*reward*) dan kronologi penjatuhan hukum/sanksi (*punishment*).

KETIGA : Masa tugas Tim Pengelola dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bersifat tetap dan tidak terikat pada 1 (satu) tahapan kegiatan atau 1 (satu) tahun anggaran.

KEEMPAT : Tim Pengelola dan Penilai melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana secara periodik untuk dapat dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efektivitas penerapan kebijakan, kepatuhan prosedur, evaluasi kinerja, dan perbaikan capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 5 Oktober 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Pen Prasetya Arta

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI AYU ARDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN
PENILAI PELAKSANAAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN/SANKSI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENILAI PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Tim Pengelola dan Penilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua
2.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Desak Made Dwi Widianteri, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 5 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI AYU ARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

I Wayan Peri Prasetya Arta